

SKRIPSI

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE,
PROFITABILITAS, DAN INVENTORY INTENSITY
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**



Disusun Oleh :

Cindy Tri Wahyuni Zahri

1721210026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Genap Tahun 2020/2021

**PENGARUH CORPORATE GOVENANCE, PROFITABILITAS, DAN
INVENTORY INTENSITY TERHADAP MANAJEMEN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

Cindy Tri Wahyuni Zahri

1721210026

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate govenance*, profitabilitas, dan *inventory intensity* terhadap manajemen pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Manajemen pajak diukur dengan tarif pajak efektif.

Sampel penelitian ini adalah sektor pertambangan pada tahun 2016-2019 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel penelitian adalah 10 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian ini. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* dengan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$ dan profitabilitas dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan *inventory intensity* dengan nilai signifikan $0,267 > 0,05$ tidak mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

Kata Kunci : *Corporate governance*, profitabilitas, *inventory intensity*, manajemen pajak, komisaris independen, dan margin laba bersih.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Harta pusaka ini tersebar di seluruh pelosok negara Indonesia. Kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola dari seluruh kekayaan alam yang tersedia adalah yang berasal dari dalam bumi. Pertambangan Indonesia memberikan nilai jual produk yang begitu bernilai dengan sokongan banyak tenaga kerja dan sektor pendukung. Indonesia kaya akan wilayah tambang yang meliputi : tambang minyak dan gas alam, tambang pasir, tambang batu bara, tambang emas, tambang batu, tambang aspal, dan tambang mineral lainnya yang menjadikan tambang salah satu sumber daya alam yang utama di Indonesia (www.agincourtresources.com).

Pertambangan, menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianakemaskan

oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaraan pajak.

PT Multi Sarana Avindo (MSA) adalah perusahaan batu bara yang pernah mendapat gugatan dari DJP atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009, dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran PRAKARSA pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Tetapi, kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun DJP dapat mengungkapkan lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan. Dari sini maka dapat dipastikan bahwa manajemen pajak itu berperan penting terhadap suatu perusahaan agar dapat terhindar dari terjadinya penghindaraan pajak dan penggelapaan pajak.

Data laba bersih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dimana mengalami penurunan.

Tabel 1.1

**Data Laba Bersih Perusahaan Pertambangan
(Dalam Bentuk dollar USD)**

No	Perusahaan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Adaro Energy Tbk.	381.770	518.131	468.611	387.508
2.	Baramulti Suksessaranan Tbk.	27.394.005	82.545.467	69.388.879	30.038.352
3.	Bumi Resources Tbk.	117.752.192	239.373.703	158.777.315	6.339.172
4.	Harum Energy Tbk.	17.860.380	54.979.076	41.715.064	20.475.279
5.	Indika Energy Tbk.	102.566.344	321.714.056	98.216.565	16.475.433
6.	Resoure Alam Indonesia Tbk.	9.472.864	13.439.975	475.600	5.414.352
7.	Medco Energi Internasional	194.960.914	189.67.553	19.580.324	25.680.588
8.	Energi Mega Persada Tbk	440.749.971	14.972.827	8.865.621	20.315.439
9.	J Resources Asia Pasifik Tbk	22.263.842	9.808.924	19.890.379	15.944.977
10.	Indo Tambangraya Megah Tbk	133.657	249.703	260.749	128.326

Sumber : web resmi di setiap perusahaan

Dapat dilihat dari data diatas bahwa pada tahun 2016 ke 2017 ada beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan, tetapi ada juga yang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2017 ke 2018 perusahaan mengalami penurunan sehingga laba yang didapat kecil dari tahun sebelumnya.

Manajemen perpajakan secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha menyeluruh yang diupayakan oleh wajib pajak agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya, metode ini merupakan proses untuk meminimalisir beban pajak namun tetap

berada pada jalurnya, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tujuan dari manajemen keuangan. Intinya, manajemen perpajakan bukan untuk mengelak membayar pajak, akan tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meminimalisir risiko utang pajak yang bisa saja timbul dalam suatu transaksi yang rutin (www.onlinepajak.com).

Lumbantoruan (1996) menyatakan bahwa manajemen pajak erat kaitannya dengan laba rugi perusahaan. Manajemen pajak merupakan upaya memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak pada jalur yang benar namun berakibat beban pajak berkurang sehingga laba dan likuiditas sesuai dengan yang diharapkan. Dengan menerapkan manajemen pajak wajib pajak juga mampu melakukan estimasi pajak yang ditanggung. Manajemen pajak dibuthkan untuk mengontrol transaksi rutin perpajakan sehingga menghindari koreksi fiskla yang terlalu banyak saat pelaporan SPT.

Tarif pajak efektif merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan sehingga menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. (Jurnal:Vidyanto Nugroho).

Dalam penelitian ini akan menggunakan indikator tarif pajak efektif dalam mengukur manajemen pajak. Rumus yang akan digunakan untuk mengukur tarif pajak efektif yakni :

Tarif Pajak Efektif (ETR)

$$\text{Tarif Pajak Efektif (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : Darmadi (2013).

Pada perusahaan yang *go publik* umumnya terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Hal ini didukung oleh pendapat Tuan (2014) yang menyatakan bahwa ketika pemilik dan manajer adalah orang yang berbeda, sangat tidak mungkin bagi pemilik perusahaan mengamati secara efektif apakah manajer bekerja keras atau lalai. Pengelolaan yang terpisah dari pemilik memungkinkan terjadi perselisihan antara pihak *agent* dan *principal*. Perbedaan kepentingan ini disebut *agency problem*. Teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976) memiliki arti bahwa saat perusahaan memisahkan tugas *agent* dan *principal*, maka akan rentan terhadap konflik kepentingan. *Agency problem* dapat diminimalisasi dengan prosedur yang tepat. Salah satunya adalah menerapkan *corporate governance* sehingga manajemen pajak suatu perusahaan dapat dijalankan dengan baik.

Pemahaman mengenai prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, memiliki peran penting dalam membangun kinerja sosial perusahaan untuk komunitas lokal, seperti harapan *stakeholders*. Dengan semakin berkembangnya kesadaran

banyak pihak akan pentingnya *good corporate governance* telah mendorong banyak perusahaan untuk menjaga hubungan dengan *stakeholders*. Dengan mengadopsi *corporate governance* memiliki fungsi utama sebagai cara yang memungkinkan manajemen mengambil keputusan dalam area yang belum diatur dengan integritas (Wieland, 2005).

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. (Meilinda, 2013). Komisaris independen memiliki pengaruh yang baik terhadap manajemen pajak karena adanya peningkatan komisaris independen menyebabkan kinerja perusahaan akan semakin efektif. (Meilinda, 2013).

Pada variabel independen *corporate governance* untuk mengetahui hubungan antara *corporate governance* terhadap manajemen pajak, maka digunakan indikator jumlah komisaris independen yang menggunakan skala rasio. Rumus yang akan digunakan untuk mengukur komisaris independen yaitu :

Komisaris Independen (INDEP)

$$\text{INDEP} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber : Meilinda, 2013.

Manajemen perusahaan menggunakan profitabilitas untuk mengetahui perbandingan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Profitabilitas juga dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba

atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pada profitabilitas ini untuk mengetahui keuntungan laba yang didapat suatu perusahaan maka manajemen menggunakan Margin Laba Bersih.

Net Profit Margin

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Sumber : NU Ningsih, 2020.

Margin Laba Bersih digunakan dalam menghitung profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang di dapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi manajemen pajak pada suatu perusahaan.

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki pada persediaan (Darmadi, 2013). Pada PSAK Nomor 14 tentang persediaan menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dari pesediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka laba perusahaan dapat menurun. Penurunan laba tersebut menyebabkan perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

Inventory Intensity (INTPERS)

$$\text{INTPERS} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

sumber : Darmadi, 2013.

Menurut Herjanto (2007) mengenai hal kepemilikan aset atau *inventory intensity* dapat mengurangi beban pajak yang harus perusahaan bayar karena

beban – beban akan muncul ketika adanya persediaan. *Inventory intensity* memberikan informasi tentang besaran persediaan barang yang dimiliki dengan tingkat total aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai persediaan lebih besar maka depresiasi barang semakin besar dan mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepada perusahaan tersebut. Dengan adanya pengurangan pajak yang terjadi pada *inventory intensity* dapat membantu terjadinya manajemen pajak dalam suatu perusahaan.

Penelitian terdahulu mengangkat kasus tentang penghindaraan pajak yang terjadi di Indonesia adalah perusahaan tambang Bakrie Group yang terjadi pada tahun 2009 atas tunggakan pajak dan perusahaan PT. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan *global witness* perusahaan Adaro melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya *coaltrade Services Internasional* di Singapura yang telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. *Coaltrade Services International* membeli batu bara dari perusahaan tambang Adaro yang berada di Indonesia dengan harga yang rendah, kemudian Coaltrade menjual batu baranya kepada pihak ketiga dengan harga pasar lebih tinggi, serta membukukan keuntungan yang dihasilkan di Singapura. Dari kasus ini bisa dipastikan bahwa manajemen pajak perlu dilakukan dalam suatu perusahaan agar dapat meminimalisir beban pajak dari suatu perusahaan.

Penelitian mengenai profitabilitas, *inventory intensity*, dan *corporate governance* sudah banyak dilakukan sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Penelitian

yang dilakukan oleh Noor, Syazwani dan Azam (2010) menemukan hubungan positif antara manajemen pajak dengan karakter perusahaan dan sistem pajak suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Dwi Saputra menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Minah Nurjanah dan I Putu Gede Diatmika (2017) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “*Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Inventory Intenisty Terhadap Manajemen Pajak*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
3. Apakah inventory intensity berpengaruh terhadap manajemen pajak ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka variabel yang akan diteliti adalah manajemen pajak. Dalam pengumpulan data penelitian melalui web www.idx.co.id tahun 2016-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan mengenai sasaran, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh inventory intensity terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan manajemen pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik *corporate governance* perusahaan bersangkutan. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak

terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi pembaca yang berhubungan dengan bidang akuntansi terutama pada manajemen pajak perusahaan.

1.6 Sistematika

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam pembentukan hipotesis, dan kerangka pemikiran yang akan menjelaskan mengenai garis besar penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi, dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti mencoba menganalisa dan membahas berdasarkan *leverage*, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi variabel dependennya yaitu kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang menjelaskan mengenai hasil analisis dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, Danis, dan Zulaikha. 2014. Pengaruh *Size*, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 3, No. 2, hal. 1-9.
- Anthony, Robert N, Govindarajan Vijay, 2006, Management Control System, Edisi 11, Alih Bahasa Kurniawan Tjakrawala, Jakarta : Salemba Empat
- Citra Lestari Putri, dan Maya Febrianty, 2016. Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim, dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4, hal.1-12.
- Efata, Steffi dan Meiriska Febrianti, 2017. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 19, No 1a-4.
- Imelia, Septi, Zirman, dan Rusli. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada perusahaan LQ445 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 2, No. 2.
- Maria Meilinda, 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011.
- Mutia Dianti Afifah, dan Mhd Hasymi, 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1.

Setiawan, Ade, Al-Ahsan, Muhammad Kholiq, 2016. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Komite Audit, Tax Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Rate. *Jurnal EKA CIDA*, Vol 1 No 2.

Yeye, Ratih dan Nuraini, 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2016). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi*.

Zulkarnaen, Novriansyah. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak (Studi Empris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Esensi : Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1.

